

Hikmah Ramadan

Mewariskan Praktik Kedermawanan di Bulan Suci

Oleh: Rachmat Kozara



SEKTOR filantropi menjadi salah satu kekuatan dan solusi atas pembentukan karakter. Karena itu dirasa perlu untuk terus diwariskan dalam menghadapi tantangan global dan anomali di berbagai aspek kehidupan untuk kemudian nantinya menjadi budaya yang tidak terpisahkan dari identitas bangsa Indonesia. Strategi yang perlu dilakukan dengan menumbuhkan jiwa filantropi dalam menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan.

Ramadan merupakan momentum atau waktu terbaik bagi umat Islam dalam memaksimalkan ibadah, wajib maupun sunnah. Kuatnya nilai dan ajaran agama Islam dalam tradisi menyumbangi menjadi penopang utama kedermawanan tumbuh pesat dan mengakar di Indonesia. Praktik kedermawanan saat ini menjadi identik dan sorotan yang sangat serius, ditandai dengan bagaimana penerapan regulasi pengelolaan zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) dijalankan, apakah sudah sesuai koridor yang seharusnya atau belum, baik secara syariat maupun secara ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Salah satu hikmah positif dari masifnya gerakan filantropi di Indonesia saat ini adalah menjamurnya kampung-kampung Ramadan untuk menyemarakkan bulan suci dan mensyiarkan atau mengedukasi masyarakat tentang urgensi kepedulian sosial. Aktifitas ibadah yang dilakukan bukan hanya ritual untuk meraih ridho-Nya, melainkan juga menyentuh sisi nurani yang menggerakkan kita untuk berbagi kepada sesama yang saling membutuhkan.

Secara regulasi landasan hukumnya jelas melalui amanat Undang Undang, pemerintah menganjurkan agar masyarakat memilih lembaga pengelola zakat resmi untuk mengelola dana ZISWAF nya agar amanat dalam meningkatkan kesejahteraan dan menanggulangi kemiskinan di Indonesia dapat tercapai. Sedang secara syariat, dijelaskan dalam Alquran bahwa dalil menunaikan zakat seringkali bersandingan dengan perintah salat, dan iAmilf sebagai pengelola zakat yang berwenang ditetapkan agar lebih terorganisir dengan rapi, baik dalam pe-

mentuan kebijakan tentang pengumpulan maupun pendistribusian agar kemaslahatannya bisa menjangkau lebih luas.

Tantangan yang kita hadapi bersama tentang aktifitas filantropi di Indonesia adalah bagaimana menyatukan seluruh lembaga filantropi yang ada agar terus memunculkan berbagai inovasi terobosan dalam proses pelaksanaan pengelolaannya, sehingga akselerasi untuk mewariskan praktik kedermawanan dapat dirasakan secara efektif dan efisien. Contoh dalam penggalangan dana crowdfunding harus terus berkembang dan menyentuh platform digital sesuai zamannya untuk perluasan akses jangkauan. Konsep pendayagunaan yang dilakukan juga harus dikemas dalam program-program strategis dan berorientasi jangka panjang yang beririsan langsung dengan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Hadimnya tantangan tersebut memberi gambaran kepada kita untuk berupaya mencari jalan keluar atas permasalahan yang ada tanpa meninggalkan karakter kita sebagai hamba dengan menjunjung tinggi prinsip hubungan horizontal dan vertikal *habluminallah - habluminannas*. Hal ini sangat penting dilakukan agar menjadi pondasi kekuatan untuk bisa sama-sama bertahan, karena sejatinya dengan membantu orang lain secara langsung juga membantu diri dan keluarga kita sendiri dari berbagai macam risiko ekonomi, resiko sosial, hingga risiko spiritual.

Dengan semakin banyaknya gerakan filantropi di Indonesia menghadirkan nuansa positif dengan berbagai pilihan kepedulian untuk saling membantu satu sama lain secara bersama-sama mulai dari tingkatan terkecil yakni keluarga hingga skala yang lebih besar yakni bermegara.

(*)-f

Rachmat Kozara, Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Konsentrasi Filantropi Islam, Kebencanaan dan Pembangunan Berkelanjutan serta sebagai Sekretaris BAZNAS DIY

Redaksi menerima sumbangan naskah Hikmah Ramadan. Naskah bisa dikirim ke email naskahkr@gmail.com. (Red)

LANCARKAN ARUS MUDIK LEBARAN

Pekerjaan Tol Yogya - Bawen Disetop Sementara

SEMARANG (KR) - Proyek pembangunan konstruksi Jalan Tol Bawen-Yogyakarta di wilayah Kabupaten Semarang Jawa Tengah, akan dihentikan sementara mulai H-10 Lebaran 2024. Penghentian ini dimaksudkan agar tidak mengganggu kelancaran arus mudik.

"Mulai 31 Maret 2024 sudah dihentikan pengerjaannya," kata Prajudi, Direktur Utama PT Trans Marga Jateng (TMJ) selaku pengelola ruas Tol Semarang-Solo, di Semarang, Jumat (22/3).

Menurutnya, pelaksanaan pembangunan konstruksi Tol Bawen-Yogyakarta yang dimulai setelah gerbang Tol Bawen di Kabupaten Semarang mengganggu akses masuk menuju ruas tol Semarang-Solo. Penghentian sementara proyek Tol Bawen-Yogyakarta rencananya akan dilakukan hingga 22 April 2024.

"Kami berupaya agar akses kendaraan yang akan masuk maupun keluar

melalui gerbang tol Bawen tetap lancar. Kalau terjadi kepadatan tinggi di pintu keluar Tol Bawen, akan dialihkan ke gerbang tol selanjutnya, yakni gerbang tol Salatiga," jelasnya.

Pada Lebaran tahun ini, kata Prajudi, 1,5 juta kendaraan diperkirakan melintas di ruas tol Semarang-Solo saat arus mudik. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada H-4 dengan jumlah kendaraan yang melintas akan mencapai 72.000 unit.

PT TMJ, lanjut Prajudi, memastikan kondisi infrastruktur penunjang di ruas Tol Semarang-Solo siap menghadapi arus mudik tahun ini. Pemberlakuan sistem satu arah saat arus mudik mulai dilaksanakan pada 5 sampai 9 April 2024. Mulai 5 sampai 7 April 2024 akan diberlakukan sistem satu arah nonstop dari arah barat hingga Semarang. Saat arus balik, sistem satu arah mulai diberlakukan pada 12 sampai 16 April 2024.

(Ant/Has)-f

HADAPI GUGATAN

KPU Pertahankan Hasil Perolehan Suara Pemilu 2024 di MK

JAKARTA (KR) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menegaskan, akan mempertahankan hasil perolehan suara Pemilu 2024 yang ditetapkan pada Rabu (20/3) lalu untuk menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Tentunya kami sebagai penyelenggara pemilu, kami akan mempertahankan hasil perolehan suara yang telah ditetapkan secara nasional," ujar Idham, di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (22/3).

Hal itu, menurutnya, merupakan prinsip penyelenggara pemilu yang memuat unsur akuntabilitas. Selain itu, proses rekapitulasi penghitungan suara pun sudah dilakukan secara berjenjang, terbuka dan partisipatif. "Kami sangat yakin, proses itu telah memenuhi unsur akuntabilitas," tegasnya.

Sebelumnya, Rabu (20/3), KPU RI menetapkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan Capres-Cawapres terpilih pada Pilpres 2024.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan KPU No 360 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pilpres, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengungkapkan, pasangan Prabowo-Gibran meraih 96.214.691 suara. Sementara itu, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 40.971.906 suara, sedangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD meraih 27.040.878 suara. Adapun total surat suara sah, berjumlah 164.227.475 suara.

(Ant)-f



KR-Antara/Rivan Awal Lingga

BANJIR DI JAKARTA: Pengendara mendorong motornya saat melintasi banjir di Kawasan Joglo, Jakarta, Jumat (22/3/2024). Banjir yang menggenangi jalan tersebut disebabkan tingginya curah hujan dan sistem drainase yang buruk.

USAI DIJATUHI SANKSI ETIK

Pungli Rutan, 76 Pegawai KPK Diperiksa

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan pemeriksaan disiplin terhadap 76 pegawainya. Pemeriksaan dilakukan kepada mereka yang diduga terlibat dalam perkara pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK.

"Terkait pelanggaran pada Rutan Cabang KPK, Tim Pemeriksa yang terdiri dari inspektorat, biro SDM, atasan langsung pegawai, serta para koordinator bagian pengamanan telah melakukan pemeriksaan disiplin terhadap 76 orang PNS KPK sebagai terduga pelanggaran disiplin PNS," kata Kepala Bagian Pemerintahan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (22/3).

Dijelaskan, tim tersebut selanjutnya akan melaporkan hasil pemeriksaan kepada Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Pemeriksaan terhadap para pegawai tersebut telah berlangsung sejak 26 Februari 2024 sampai dengan 21 Maret 2024.

"Laporan tersebut akan menjadi dasar bagi PPK KPK menentukan sanksi penjatuan hukuman disiplin PNS sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS," ujarnya.

Adapun hukuman disiplin yang akan dijatuhkan oleh PPK KPK hanya bisa diterapkan kepada Pegawai KPK setelah Pegawai KPK beralih status menjadi PNS KPK. Sedangkan pegawai yang bersumber dari instansi lain (PNYD) akan dikoordinasikan ke instansi asalnya.

Sebagaimana diketahui, dari 78 orang Pegawai KPK yang dijatuhi sanksi etik oleh Dewan Pengawas KPK, terdapat 76 orang PNS KPK yang menjadi terduga pelanggaran disiplin PNS. Selain itu, satu orang pegawai KPK berstatus sebagai

PNYD dari unsur kepolisian, terhadapnya tidak dapat dilakukan pemeriksaan disiplin PNS karena status kepegawaian yang bersangkutan adalah bukan PNS, serta satu orang pegawai KPK yang berstatus PNS KPK, namun karena tempat pembuatannya dilakukan sebelum yang bersangkutan diangkat sebagai PNS KPK, sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan disiplin PNS.

Selain proses yang telah dilakukan oleh Dewas melalui penegakan etik dan proses hukum dugaan tindak pidana yang telah menetapkan 15 orang sebagai tersangka, maka proses penyidikannya masih berlanjut dan terus dilakukan pendalaman serta penelusuran lebih lanjut. KPK juga akan terus menyampaikan perkembangan penanganan pelanggaran tersebut sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada Masyarakat. "Pemeriksaan pelanggaran disiplin ini sebagai bentuk komitmen lembaga untuk menjaga marwah KPK," tutur Ali.

(Ant/Has)-f

BERI KENYAMANAN SAAT LEBARAN

BPH Migas Amankan Pasokan Energi

JAKARTA (KR) - BPH Migas terus bersiap menghadapi Idul Fitri 1445 H yang diperkirakan jatuh pada 9 April 2024. Ketersediaan pasokan energi yang memadai akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, khususnya saat merayakan Lebaran 2024 di kampung halaman.

"BPH Migas berkomitmen mengamankan pasokan energi selama periode Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah," kata Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati di Jakarta, Jumat (22/3).

Terkait BBM, menurut Erika, cakupan hari BBM atau coverage days juga harus dijaga dengan baik oleh badan usaha penugasan. "Kita harapkan selama Ramadan dan Idul Fitri tidak ada kekurangan BBM dan masyarakat tetap dapat terlayani. Kepada Pertamina, untuk memitigasikan daerah rawan longsor dan banjir mengingat masih musim hujan," tegasnya.

Kerja keras dan komitmen pemerintah guna mengamankan pasokan energi mendapatkan apresiasi dari Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon. Menurutnya, energi menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang sangat penting agar tetap dijaga dan dipenuhi. "Rapat ini sebagai bentuk menjangkau aspirasi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan di bidang energi dan kita akan membahas perkembangan kesiapan pemerintah untuk keandalan pasokan BBM, gas, dan listrik menjelang Idul Fitri 1445 H," ungkapnya.

Dony juga mengimbau badan usaha

ha mengutamakan kenyamanan masyarakat ketika mengakses energi selama mudik berlangsung. "Semua pihak harus punya strategi dan antisipasi yang baik untuk masyarakat di rumah maupun kelompok industri, jangan sampai ada kendala," tambahnya.

Di tempat yang sama, Direktur Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina (Persero) Alfian Nasution menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian/lembaga terkait dalam persiapan Satgas Ramadan dan Idul Fitri Pertamina 2024.

"Kami membuat strategi untukantisipasi kegiatan masyarakat saat arus mudik Lebaran terhitung dari 25 Maret 2024 hingga 21 April 2024," ucapnya.

(Ant/Has)-f

KASUS TPPO MAHASISWA DI JERMAN

Penyidik Polri Tetapkan Lima Tersangka

JAKARTA (KR) - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri masih mendalami kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok program magang di Jerman atau *ferien job* dengan meminta keterangan sejumlah pihak. Bareskrim juga akan bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kemendikbud.

"Berkaitan dengan perkara ini Polri akan memanggil untuk meminta keterangan dan kami bekerja sama dengan semua pihak terkait termasuk Kemendikbud," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (22/3).

Terkait siapa saja pihak yang diminta keterangan apakah pihak kampus, Trunoyudo menyebut pihak yang diminta keterangan dan koordinasi adalah saksi-saksi yang mengetahui, melihat dan mendengar peristiwa tersebut sehingga dapat membuat terang sebuah peristiwa pidana.

"Tentunya saksi-saksi yang diminta keterangan dan koordinasi untuk membuat terang sebuah tindak pidana," katanya.

Penyidik sudah menetapkan lima orang tersangka, yakni ER alias EW; A alias AE, SS, AJ dan MJ. Dua dari lima tersangka masih berada di Jerman. Sedangkan seluruh korban sudah berada di Indonesia. "Saat ini seluruh korban telah berada di Indonesia karena kontrak program magang telah habis pada Desember 2023 kemarin," kata Trunoyudo.

Kasus TPPO berkedok program magang ini terungkap setelah empat mahasiswa mendatangi KBRI di Jerman yang sedang mengikuti *ferien job*. Setelah ditelusuri oleh KBRI, program ini dijalankan sebanyak 33 Universitas di Indonesia dengan total mahasiswa yang diberangkatkan sebanyak 1.407 mahasiswa. "Namun mahasiswa tersebut dipekerjakan secara non prosedural sehingga mahasiswa tersebut tereksplotasi," kata Trunoyudo.

Awalnya para mahasiswa mendapatkan sosialisasi dari PT CVGEN dan PT SHB adanya program magang di Jerman. Saat mendaftar mahasiswa diminta membayar biaya sebesar Rp150 ribu ke rekening PT CVGEN dan membayar sebesar 150 Euro untuk pembuatan letter of acceptance (LOA) kepada PT SHB. Setelah LOA terbit korban harus membayar sebesar 200 Euro lagi kepada PT SHB untuk pembuatan approval otoritas Jerman atau working permit.

Mahasiswa juga dibebankan dana talangan sebesar Rp 30-50 juta dimana pengembalian dana tersebut dengan cara pemotongan upah kerja tiap bulan. Selain itu, setelah mahasiswa sampai di Jerman langsung di sodorkan surat kontrak kerja oleh PT SHB dan working permit untuk didaftarkan ke Kementerian Tenaga Kerja Jerman. Mahasiswa yang menjadi korban melaksanakan *ferien Job* dalam kurun waktu selama tiga bulan dari bulan Oktober hingga Desember 2023.

(Ant/Has)-f